

PEMIKIRAN DAN AKSI POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF

SULTANI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak, Syafii Maarif is an Indonesian Muslim thinker who has thoughts on the relationship between Islamic teachings and politics. He once served as Chairman of Muhammadiyah and served as a member of the Supreme Advisory Council of Indonesia. According to him, Islam has a relationship with politics and the state, because Islamic teachings will give color to the politics. Politics is not only limited to power, but politics is noble, namely providing services to the community. Therefore politics is *ijtihad siyasi* by Muslim thinkers. The basis, form, purpose and head of state are determined by the people as forming the state. The Indonesian people have decided to form the Republic of Indonesia based on Pancasila which protects the pluralistic Indonesian people. This is in accordance with Islamic teachings in the view of Syafii Maarif.

Kata Kunci: Pemikiran, Aksi dan Politik

Pendahuluan

Hubungan agama dan politik selalu hangat untuk didiskusikan. Hal ini sudah menjadi objek kajian para pemikir Islam sebelum zaman modern ini, seperti Ibnu Taimiyyah, al-Mawardi, al-Ghazali dan sebagainya.¹ Masing-masing pemikir berteori tidak lepas dari situasi dan kondisi yang ada pada zamannya. Indonesia sebagai salah satu negara modern yang memiliki heterogenitas tinggi, tentu memiliki teori tersendiri yang dihasilkan oleh anak bangsa dan zamannya. Salah satu pemikir muslim Indonesia yang memikirkan tentang teori politik yang sesuai dengan negara Indonesia adalah Syafii Maarif.

Syafii Maarif adalah seorang santri dari keluarga dan masyarakat yang religius serta lama menuntut ilmu-ilmu agama Islam di pondok pesantren yang dikelola Muhammadiyah yang beraliran modern dan juga pernah menuntut ilmu di bawah asuhan Fazlur Rahman di Amerika Serikat yang tentu ini memiliki pengalaman dan pemikiran tersendiri di bidang politik Islam. Guru besar pada

¹Pemikiran mereka ini bisa dilihat pada Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press,1993) dan juga buku J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999).

bidang filsafat sejarah mengantarkannya untuk lebih memahami Islam dalam bingkai Ke-Indonesiaan dan Kemanusiaan.²

Di antara pemikiran Syafii Maarif yang sangat kontroversial adalah muslim di Indonesia tidak perlu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Usaha untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam adalah perbuatan sia-sia dan menguras energi. Ia dengan sangat berani telah menyangkal pendapat sekelompok orang yang masih ingin berjuang untuk menjadikan Indonesia menjadi *Daulah Islamiyyah*. Ia menilai bahwa kelompok yang masih memperjuangkan negara Islam di Indonesia merupakan sebuah tindakan yang menghabiskan energi namun tidak akan memberikan hasil yang sangat bermanfaat dalam berbangsa dan bernegara terutama bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa kepala negara tidak mesti kaum Qurashih, akan tetapi siapa saja yang mampu dan memenuhi syarat bisa menjadi kepala negara. Ia tidak hanya menyampaikan pemikirannya dalam bidang politik, akan tetapi ia juga melakukan aksi-aksi yang mendukung ide-ide politiknya. Ia pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memberikan nasehat dan pertimbangan untuk presiden. Pemikiran dan ide-ide Syafii Maarif sering dijadikan sandaran dalam beragama, berbangsa dan berpolitik. Oleh karena itu ia diberikan julukan sebagai salah satu guru bangsa dari yang tiga, yaitu Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Maarif.³ Dilatarbelakangi ide, aksi dan pengalaman Syafii Maarif di Indonesia maka sangat perlu dilakukan kajian tentang pemikiran dan aksi politiknya di Indonesia.

Riwayat Hidup Sayafii Maarif

Syafii Maarif yang bernama lengkap dengan Ahmad Syafii Maarif lahir pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 1935 di sebuah jorong kecil yang bernama Calau kenagarian Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Ia dilahirkan dalam keadaan piatu, dimana ibunya yang bernama Pathiyah wafat saat usia 32 tahun, yaitu pada tahun 1937 dimana saat itu usianya masih delapan belas bulan. Ayahnya yang bernama Ma'rifah Rauf Dt.Rajo Malayu adalah seorang kepala suku Malayu dengan menyandang gelar *Datuk Rajo Malayu*. Ia seorang Kepala Nagari yang diangkat pada tahun 1936 hingga tahun 1945.

²Lihat karyanya Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah* (Jakarta: Mizan, 2009).

³Sumanto Al-Qurtuby, *Buya Syafii, Atesime dan Hak-Hak Kewargaan Kuam Ateis di Indonesia*, dalam Ahmad Najib Burhani, et.all (Ed), *Muazzin Bangsa dari Makkah Darat* (Jakarta: Maarif Institute dan Serambi, 2015), h. 336.

Pendidikan pertama, ia menempuh dua sekolah dalam waktu yang sama, yaitu; Sekolah Dasar di Sumpur Kudus dan Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah. Setelah tamat, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Muallimin di Lintau. Ia mulai dewasa dan matang dalam berpikir setelah belajar di Madrasah Muallimin Lintau ini. Lebih lanjut, ia melanjutkan pendidikannya ke Kulliyatul Muallimin Yogyakarta. Di sekolah ini, ia banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang membantunya kelak setelah dewasa. Setelah tamat dari Kulliyatul Muallimin Yogyakarta, ia mengabdikan diri di Lombok Timur untuk mengajar. Ia menetap dan mengajar di sana selama setahun, dan kemudian kembali ke kampung halamannya sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Ia menempuh kuliah di Universitas Cokroaminoto pada tahun 1957 s.d.1964 dengan memperoleh gelar B.A. Ia kuliah sambil bekerja untuk memenuhi kehidupan.

Pekerjaan yang dilakukannya adalah mengajar mengaji, buruh memilah dan memilah besi tua, dan pelayan toko kain, jualan ayam dan kambing, jualan rokok dan tembakau dan juga menjadi guru pada beberapa Sekolah Menengah di Baturetno dan Solo. Untuk melengkapi gelar kesarjanaannya, maka Syafii Maarif melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta. Untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya, ia belajar di Northern Illinois University (De Kalb) pada tahun 1972. Ia tidak bisa menuntaskan kuliahnya di kampus ini dan gagal serta harus kembali ke tanah air pada tahun 1973 demi keluarga, karena pada saat itu anak Syafii Maarif yang bernama Iwan sedang sakit dan membutuhkannya untuk merawatnya. Berkat perjuangan dan doa, untuk melanjutkan pendidikan yang pernah gagal, Syafii Maarif lulus di Universitas Hawaii dan Ohio University di Athens. Lulus pada perguruan tinggi yang hebat di Amerika Serikat, ia merasa bangga dan bersyukur. Syafii Maarif memilih Ohio University untuk mendapatkan gelar M.A dengan beasiswa Fulbright dengan judul tesis *Islamic Politics under Guided Democracy in Indonesia (1959-1965)* di bawah bimbingan Prof. William H. Frederick, Ph.D. Masa perkuliahan di Ohio State University cepat diselesaikan hanya dalam satu tahun, yaitu sampai tahun 1977. Yang sangat menarik selama kuliah di Ohio Universty, Syafii Maarif telah mengambil program Ph.D di Universitas Chicago. Akhir tahun 1978 Syafii Maarif sudah berada di Chicago. Jadi, selama kuliah di Chicago mengambil program Ph.D, Syafii Maarif juga menulis tesis di Athens.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian Syafii Maarif, yaitu keluarga, budaya Minangkabau, Muhammadiyah, pendidikan di pesantren dan di Amerika. Ini semua mempengaruhi sifat, sikap dan cara berpikirnya. Keluarga Syafii Maarif juga merupakan keluarga yang taat beragama, garis keturunan ayah adalah keturunan yang aktif pada organisasi Pendidikan Islam Persatuan Tarbiyah

Islamiyah (Perti),⁴ sedangkan ibunya dari keluarga Muhammadiyah, yang orientasinya pemurnian ajaran agama Islam melalui pendidikan dan sosial.⁵ Lingkungan Minangkabau juga mempengaruhi pemikiran dan sikapnya. Ajaran-ajaran filsafat Minangkabau banyak diperoleh Syafii Maarif semenjak kecil. Ia sering mendengar ajaran-ajaran filsafat Minangkabau pada upacara-upacara tertentu, seperti *alam takambang jadi guru*.⁶ Ini artinya bahwa alam yang luas ini bisa dijadikan tempat belajar dan pembelajaran. Menurut Syafii Maarif, dengan ajaran filsafat ini orang Minang semestinya tidak Cuma belajar di bangku sekolah atau madrasah, akan tetapi juga seharusnya pandai membaca alam semesta. Itulah sebabnya, menurutnya orang Minang itu banyak merantau ke negeri orang lain untuk belajar, namun bukan berarti meninggalkan kampung halaman. Selain itu *tak lekang* karena panas, *tak lapuk* karena hujan. Ini artinya adalah bahwa nilai-nilai adat Minangkabau itu tidak akan tertinggal, asal dia sesuai dasar-dasar adat yang ada dan dibenarkan oleh ajaran Islam. Adat ini juga disandingkan dengan agama Islam. Salah satu filsafat minang tentang hubungan agama Islam dan adat adalah *adat nan manurun, syarak nan mandaki* yang mana gerak adat dan agama akan berkesimpulan pada formula *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dan *syarak mangato adaik mamakai*. Ini artinya ketika syariat Islam sudah menjelaskan maka adatlah yang akan menerapkannya. Adat akan selalu sesuai dengan syariat, dia tidak akan menyalahi syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. Oleh karena itu budaya Minangkabau akan mempengaruhi kepribadian Syafii Maarif kelak setelah dewasa.

Muhammadiyah juga sangat mempengaruhi kepribadian Syafii Maarif. Pendidikan yang ada pada organisasi Muhammadiyah telah diperoleh Syafii Maarif semenjak kecil hingga tua. Untuk membuktikan besarnya pengaruh Muhammadiyah pada dirinya, ia menyatakan “*Siapakah aku tanpa Muhammadiyah?*”⁷... Ia juga menyatakan bahwa kesuksesannya juga dipengaruhi oleh Muhammadiyah.⁸ Doktrin yang ada pada Muhammadiyah pasti akan berpengaruh kepada kepribadiannya. Ini terlihat tentang pemikiran Syafii Maarif berkaitan hubungan seorang muslim dengan negara. Konsep yang ada di dalam Muhammadiyah adalah Indonesia adalah *Dar al-‘Ahd wa al-Syahadah*. Arti konsep ini adalah bahwa warga negara Indonesia yang terdiri dari beberapa

⁴Rusli dan Fachri, “Muhtadi, *Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad XX*”, dalam Jurnal Tarikhuna: Journal of History and History Education, Vol. 3 No. 1 Mei 2021, h. 79-80.

⁵Mar’ati Zarro, *et.al*, “*Muhammadiyah Sebagai gerakan Islam dan Pendidikan*”, dalam Jurnal Factum; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 9 No. 1 April 2020, h. 66.

⁶*Ibid.*, h. 67.

⁷Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanku; Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*, Jakarta: Mizan dan Maarif Institut, 2009), h. 229.

⁸*Ibid.*, h. 228.

kelompok dan kepentingan yang telah menyatakan dan berjanji (*al'-ahd*) bersama-sama untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tidak hanya menyatakan dan berjanji saja akan tetapi juga bersaksi (*wa as-syahadah*) bahwa janji itu diikuti dengan tindakan nyata untuk mengisi pembangunan setelah negara tersebut terbentuk.

Pemikiran-pemikiran Syafii Maarif yang sangat kontroversial banyak diperolehnya setelah belajar di dunia Barat. Tidak hanya pemikiran tentang hubungan Islam dan negara atau kekuasaan juga berkaitan dengan masalah toleransi inter dan antar umat agama. Ia menjelaskan bahwa pemahaman toleransi inter dan antar umat beragama mendapat porsi yang penting setelah dia dibasuh di Chicago. Namun walaupun demikian, menurutnya pemahamannya dan keyakinannya kepada Islam Qur'ani semakin kuat dan utuh setelah belajar di dunia Barat dan terutama setelah berguru dengan kiyainya Chichago.

Ada beberapa guru dan teman yang mempengaruhi Syafii Maarif. Di antara guru tersebut adalah K.H. Djazarie Hisjam yang memotivasinya untuk lebih giat belajar dan memahami arti metodologi *istinbat al-ahkam* dan juga arti ijtihad. Selanjutnya Prof. William H. Frederick seorang dosen dan peneliti sejarah Indonesia yang berasal Ohio State University (OSU). Ia banyak mengajari Syafii Maarif tentang pendekatan sejarah. Di bidang pemikiran Islam, Prof. Fazlur Rahman sangat mempengaruhi pemikiran Syafii Maarif. Banyak guru yang sangat mempengaruhinya, namun yang tiga ini sangat jelas pengaruhnya pada diri Syafii Maarif, dan ia mengakui pengaruh gurunya tersebut dalam dirinya.⁹

Prof. Dr. M. Sanusi Latief adalah salah seorang saudara dan teman yang telah turut mengubah perjalanan intelektual Syafii Maarif. Selanjutnya Amien Rais sebagai teman selama di Amerika dan juga di Muhammadiyah.¹⁰ Pengaruh Amien Rais dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid pertama sekali dirasakan oleh Syafii Maarif ketika ia ingin melanjutkan pendidikannya di Chicago University untuk memperoleh Ph.D.¹¹ Syafii Maarif menyatakan bahwa dirinya, Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai “mafia Chicago”.¹²

Syafii Maarif juga suka membaca buku-buku karya para pemikir dan aktifis muslim, seperti karya Ibnu Taimiyyah, A. Hassan, Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Hossain Nasr, Abul A'la al-Maududi, Sayyid Qutub, Fahmi Huwaydi, Fatimah Mernissi, dan Khaled Abou El-Fadl. Ia sering mengutip pendapat para pemikir muslim dari buku-buku yang dibacanya dan juga mengkritik buku-buku tersebut. Syafii Maarif tidak hanya mengutip, akan tetapi ia juga mengkritisi dan menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

⁹Leni Marlana, *Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif* dalam Jurnal Mantiq Vol. III, No.2 Tahun 2018, h. 28.

¹⁰*Ibid.*, h. 229.

¹¹*Ibid.*, h. 188.

¹²*Ibid.*, h. 228.

Syafii Maarif sudah sangat banyak menulis artikel, baik itu pada jurnal, harian surat kabar, makalah dalam seminar dan juga buku. Di antara tulisannya yang berkaitan dengan politik adalah: *Pertama*, buku dengan judul “*Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan dalam Konstituante*” diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial di Jakarta Tahun 2002. *Kedua*, buku “*Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1950-1965*” diterbitkan di Yogyakarta oleh IAIN Sunan Kalijaga Press pada tahun 1988, dan *ketiga* dengan judul “*Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah diterbitkan di Jakarta oleh Mizan pada tahun 2009*”, dan masih banyak lagi buku yang lain.

Pemikiran Politik Syafii Maarif

1. Hubungan Ajaran Islam dan Politik dalam Pandangan Syafii Maarif

Dalam pandangan Syafii Maarif, agama Islam berhubungan dengan politik, dia tidak memisahkan antara ajaran agama Islam dan politik. Menurutnya dalam Islam wawasan kekuasaan harus disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sejarah. Politik itu sangat berkaitan dengan ajaran Islam. Untuk memahami hubungan Islam dan politik bisa didekati dari dua sudut pandang, yang *pertama* bisa dilihat dari teks-teks ayat maupun hadis.¹³ Di dalam Alquran, sesungguhnya ayat yang menceritakan puasa itu sangat sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengaturan masyarakat. Ayat yang mengatur tentang pengaturan masyarakat itu adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan politik, dan ini jumlahnya sangat banyak.¹⁴ Di antaranya adalah Q.S. Al-An'am/6:162. Firman Allah Swt: *Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.* Menurut Syafii Maarif, ayat ini menjelaskan bahwa shalat di mesjid, berjualan di pasar, atau berbicara tentang masa jabatan seorang presiden di parlemen tidaklah dapat ditempatkan dalam kategori dikotomis, antara ibadat dan kerja sekuler. Shalat di mesjid adalah ibadat sedangkan pidato di mimbar parlemen adalah kerja sekuler yang harus dipisahkan dari wawasan moral. Syafii Maarif tidak menerima pendapat seperti ini, justru dalam pandangannya kedua-duanya adalah memiliki dimensi ibadah.¹⁵

Selanjutnya argumentasi yang ia ajukan tentang politik adalah Q.S. adz-Zariyat/56. *Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan*

¹³Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 194.

¹⁴Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanku*;...,h.170.

¹⁵Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia*..., h. 194.

supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Pada ayat ini dijelaskan bahwa penciptaan jin dan manusia adalah dalam rangka beribadah. Politik dalam pandangan Syafii Maarif adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu mesin kekuasaan sebagaimana yang disinggung di atas tidak lain dari suatu institusi politik yang bernama negara, yang juga berfungsi sebagai alat bagi anggota masyarakat agar mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Seharusnya negara menjadi instrumen bagi seorang muslim untuk dapat berkiprah kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah.

Menurut Syafii Maarif, permasalahan yang ada bukan hubungan Islam dan politik, akan tetapi apakah mesin kekuasaan itu merupakan perpanjangan dari agama atau semata-mata sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan pesan-pesan moral agama. Di sinilah yang belum ada kesepakatan bersama antara ulama, cendekiawan dan para pemikir politik Islam. Menurutnya para pemikir politik Islam ada yang berpendapat bahwa Islam itu adalah *din* dan *daulah*.¹⁶ Ini artinya Islam dan politik dalam arti negara adalah satu, sehingga ketika seorang muslim menolak *Daulah Islamiyyah* maka itu ia berarti menolak ajaran Islam itu sendiri. Pendapat inilah yang ditolak oleh Syafii Maarif, di mana menurutnya agama Islam dan *Daulah (politik)* tidak menyatu. Menurut Syafii Maarif, yang sangat perlu disepakati adalah Islam itu memerlukan “*pedang penolong*” yaitu negara, tanpa *pedang penolong* yang mendukungnya maka Islam dengan semua ajarannya yang sempurna dan komprehensif tidak akan mungkin ditancapkan pada realitas sosial.

Apabila *ad-din* dan *ad-daulah* yang merupakan hasil ijtihad itu disetarakan, maka menurut Syafii Maarif ini sudah berarti menyamakan alat dengan risalah.¹⁷ Cara berpikir seperti ini adalah tergesa-gesa dan sebuah penolakan terhadap teori politik Barat yang memisahkan gereja dan negara. Akibat dari pemahaman seperti itu maka para penulis Muslim banyak yang merumuskan teori Islam adalah agama dan negara sebagai *antithesa* dari para pemikir Barat yang memisahkan ajaran agama Kristen Gereja dan negara. Kelompok yang mensejajarkan *ad-din* dan *ad-daulah* adalah sebagai reaksi terhadap pemikiran Barat yang memisahkan antara gereja dan negara, menurut pandangan Syafii Maarif.

Alasan selanjutnya mengapa Syafii Maarif menolak ajaran *din wa daulah* adalah karena apabila ini diterima maka ada sesuatu yang tidak sinkron dan tidak sesuai dengan logika berfikir. *Din* adalah sesuatu yang *imutable* (tetap) tidak akan pernah berubah, sedangkan *daulah* adalah *mutable* (berubah) sesuai

¹⁶Syafii Maarif, *Islam dan Politik...*, h. 195.

¹⁷*Ibid.*,

dengan tuntutan ruang dan waktu. Apabila konsep *din wa daulah* diterima maka kita menempatkan *daulah* sejajar dengan *din*. Ini artinya kita mengagungkan negara sebagaimana mengagungkan agama. Inilah yang disebut dengan teori Hegel yang memandang negara sebagai makhluk penaka Tuhan (*a God -like creature*).¹⁸ Mengagungkan agama adalah sesuatu kewajiban, karena memang itu diyakini berasal dari Allah Swt, atau Tuhan bagi agama lain, sedangkan mengagungkan negara bukanlah sesuatu yang dibolehkan, karena konsep negara itu adalah hasil pemikiran manusia yang tidak akan lepas dari waktu dan tempat.

2. Pemikiran Syafii Maarif tentang Negara

a. Dasar Negara

Salah satu permasalahan dan isu yang sangat penting dalam politik adalah permasalahan dasar sebuah negara. Dasar negara adalah merupakan pijakan pertama dalam pembentukan sebuah negara. Dasar negara itu merupakan *grundnorm* yang merupakan kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (*kern*) dari setiap tatanan kaidah hukum dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara.¹⁹ Apa dasar negara menurut Syafii Maarif?

Syafii Maarif berpendapat bahwa dasar negara tidak diatur dalam Alquran dan Hadis. Negara tidak mesti berdasarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Hadis sebagaimana yang dituntut oleh para pemikir muslim lainnya. Pemikirannya ini dibangun atas dasar dua hal, yaitu *pertama* berdasarkan kepada penggalan dan kajiannya terhadap sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Alquran dan Hadis. Menurut Syafii Maarif tidak ada *nas* Alquran maupun hadis yang mewajibkan untuk menentukan dasar sebuah negara adalah Alquran dan Hadis. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan dasar negaranya sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dasar negara itu adalah *ijtihad mukallaf* yang ingin membentuk negara tersebut. Alasan *kedua*, didasarkan kepada pengalaman yang dialami oleh Syafii Maarif. Ia telah mengkaji bahwa dasar negara Islam tidak selalu mulus untuk diterapkan dalam sebuah negara yang pluralis atau menganut beberapa aliran agama. Indonesia pernah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh dan pemikir muslim di Indonesia untuk menjadi negara Islam, namun usaha itu gagal dan kandas.

Dari dua argumentasi di atas, maka Syafii Maarif berkesimpulan bahwa dasar negara itu bukanlah harus berdasarkan kepada Alquran dan Hadis, akan

¹⁸*Ibid.*, h. 196.

¹⁹Astim Riyanto, "Pancasila Dasar Negara Indonesia" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37No. 3 Juli-September 2007, h. 468.

tetapi berdasarkan kepada apa yang mereka yang inginkan ketika membentuk negara tersebut. Apabila masyarakat atau penduduk negara tersebut sepakat untuk membentuk negara berdasarkan kepada Alquran dan Hadis, maka itu dipersilahkan karena memang itulah kesepakatan masyarakat tersebut, sedangkan apabila mereka sepakat untuk membentuk negara berdasarkan kepada kesepakatan maka mereka bisa membangun negara berdasarkan kesepakatan tersebut. Dari sini jelas bahwa Syafii Maarif tidak menolak negara Islam yang berdasarkan kepada Alquran dan Hadis, akan tetapi ia menyatakan bahwa dasar negara itu adalah kesepakatan bersama.

Menurut Syafii Maarif, Negara Islam bukanlah sebuah keniscayaan, maka ia menawarkan untuk Indonesia yang sangat tepat adalah negara Pancasila dan sudah disepakati. Argumentasi yang mendukungnya untuk tidak menerima dasar negara berdasarkan kepada agama Islam adalah karena tidak adanya fondasi yang kokoh untuk menyatakan kewajiban membentuk negara berdasarkan kepada Islam dan realitas sosial yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam itulah seharusnya diterapkan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga tuduhan bahwa Indonesia adalah negara sekuler bisa diabaikan. Nilai musyawarah, kesetaraan dan anti korupsi adalah beberapa nilai yang harus diterapkan dalam berbangsa dan bernegara.²⁰

Berkaitan masih adanya usaha sebagian kelompok masyarakat Muslim di Indonesia untuk mendirikan dan menegakkan negara Islam, Syafii Maarif dengan tegas menyatakan “bagiku cara berpikir semacam ini bukan saja usang dan tidak realistik, tetapi merupakan sebuah halusinasi politik yang sia-sia.”²¹ Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah menurut Prof. Katimin bahwa Islam jangan dibahas sebagai ideologi negara. Islam selayaknya dijadikan menjadi sumber inspirasi dan mewarnai di dalam kehidupan berwarganegara dan Islam tidak bisa dijadikan sebuah ideologi formal bagi masyarakat yang heterogen. Menurutnya jika Islam dijadikan sebuah ideologi formal bagi masyarakat heterogen akan menimbulkan persoalan, yaitu kecemburuan sosial dari orang-orang non-muslim. Mereka akan menganggap ada diskriminasi, padahal diskriminasi itu tidak diajarkan dalam Islam, yang ada hanya keadilan.²²

b. Bentuk Negara

Berangkat dari prinsip dan logika berpikir Syafii Maarif, bahwa Alquran tidak menjelaskan teori tertentu tentang negara yang harus diikuti oleh umat muslim, maka ini berarti Alquran tidak menegaskan bentuk khas suatu

²⁰*Ibid.*, h.197.

²¹*Ibid.*, h.197.

²²Ahmad Fahrozi, *Pemikiran Politik Islam Menurut Prof.Dr.H. Katimin, M.Ag* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 59.

negara. Model dan struktur ketatanegaraan Islam bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, akan tetapi ia sangat terikat dengan perubahan, modifikasi dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan waktu dan umat.²³ Tidak ada bentuk negara yang harus diikuti oleh umat muslim dalam perspektif Syafii Maarif.

Dalam ilmu politik ada banyak bentuk pemerintahan. *Pertama* adalah *otokrasi*, yaitu kekuasaan pemerintahan itu berada pada satu orang saja. Satu orang inilah yang berkuasa untuk mengatur pemerintahan, dan biasanya ia disebut dengan raja. Bentuk pemerintahan *kedua* adalah bentuk pemerintahan *oligarki*, yaitu kekuasaan pemerintahan ada pada beberapa orang atau sekelompok orang saja, merekalah yang mengatur kepentingan orang banyak. *Ketiga* adalah *demokrasi*, yakni pemerintahan oleh banyak orang. Kekuasaan pemerintahan berada pada banyak orang atau seluruh anggota masyarakat.²⁴

Politik itu merupakan *ijtihad siyasi*, ia akan berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia yang tidak lepas dari pengaruh waktu dan tempat. J.Suyuthi Pulungan menyatakan bahwa di dalam Islam (ajaran dasarnya) tidak disebutkan sistem dan bentuk pemerintahan, struktur dan pembagian kekuasaan. Ia hanya mengandung prinsip-prinsipnya saja dalam menjalankan pemerintahan. Temuan ini sekaligus membantah dua pendapat, yaitu *pertama* teori ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, termasuk sistem ketatanegaraan dan sistem politik terdapat di dalamnya, dan ternyata menurut teori ini di dalam Islam itu hanya ada prinsip-prinsip dalam mengelola pemerintahan. *Kedua* teori ini membantah teori yang menyatakan Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan politik dan kenegaraan, padahal dalam Islam ada hubungan Islam dan politik.²⁵

Dari bentuk-bentuk negara yang diajukan oleh ahli pemerintahan di atas, mana bentuk negara yang ideal menurut Syafii Maarif? Ada dua pendapat Syafii Maarif tentang bentuk negara yang ideal. Ia pernah berpendapat bahwa Islam adalah bentuk negara yang paling ideal. Ia menulis sebagai berikut;”

Periode antara 1950-an sampai dibubarkannya Majelis Konstituante pada 5 Juli 1959, dan bahkan sampai tahun akhir 1970-an aku adalah salah seorang pendukung kuat gagasan Negara Islam Indonesia. Pemikiran tokoh-tokoh Masyumi plus Maududi adalah rujukan primerku. Cobalah ikuti pernyataan vulgarku di depan Rahman di Chicago sekitar tahun 1979 ”
Profesor Rahman, Please give me one fourth of your knowledge of Islam, I'll

²³Ahamad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan dalam Konstituante* (Jakarta, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2002), h. 18.

²⁴Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik* (Jakarta: Kompas, 2015), h.51.

²⁵Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, h. 271.

*convert Indonesia into an Islamic State. Yang sekira artinya Profesor Rahman mohon limpahkan kepadaku seperempat dari ilmumu tentang Islam, niscaya saya akan mengubah Indonesia menjadi sebuah negara.*²⁶

Pernyataan di atas merupakan *qaul qadim*-nya Syafii Maarif. Ini tidak lepas dari buku-buku yang dibacanya sebelum ia berangkat ke Amerika, seperti buku Abul A'la al-Maududi dan Maryam Jameelah.²⁷ Oleh karena itu wajar saja apabila Syafii Maarif terpengaruh dengan pemikiran Al-Maududi karena ia memang lebih sering berkomunikasi dengan karya-karya tulis al-Maududi dan juga orang yang sepaham dengannya. Ia bahkan juga menerjemahkan pemikiran-pemikiran al-Maududi di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Sedangkan dalam *qaul jadid*-nya pendapat itu berubah. Menurut Syafii Maarif bentuk negara yang ideal itu adalah republik, seperti di Iran masa sekarang. Ini lebih dekat pada sistem politik Islam yang dikehendaki Alquran, sekalipun Syafii Maarif mengakui bahwa ia menyimpan kritik terhadap sistem politik Iran ini.²⁸

Ada minimal tiga karakteristik negara republik yang membedakannya dengan negara monarki, yaitu *pertama*, peralihan kekuasaan dari satu pemimpin kepada pemimpin yang lain dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Rakyat adalah penentu siapa yang akan memimpin mereka, bukan berdasarkan keturunan. Karakteristik *kedua* pada negara republik adalah para pemimpin merupakan perpanjangan dari rakyat, sehingga pemimpin bertanggungjawab kepada rakyatnya. Pemimpin tidak akan bertindak dan berkebijakan berbeda dari apa yang diinginkan oleh rakyatnya. *Ketiga*, dalam sistem pemerintahan republik, karena pemimpin adalah diangkat oleh rakyat, maka ia bisa diterapkan pada negara kesatuan atau federal. Ini artinya negaranya boleh dalam bentuk satu kesatuan atau juga boleh dari kumpulan dari beberapa pemerintahan lokal.²⁹

Syafii Maarif menyatakan bahwa bentuk republik rasanya lebih dekat pada sistem politik Islam yang dikehendaki Alquran.³⁰ Namun walaupun demikian, politik adalah *ijtihad siyasi*. Persoalan negara dan masyarakat adalah persoalan yang dinamis, di mana ia akan mengalami perubahan dari masa ke masa. Kalau sebuah negara memandang ideologi politik "A" sebagai pegangan yang abadi, ada kemungkinan pada generasi selanjutnya, ideologi tersebut akan

²⁶Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanku...*, h.170-171.

²⁷*Ibid.*, h.168.

²⁸Syafii Maarif, *Alquran dan Realitas Umat* (Jakarta: Republika, 2010) h.11.

²⁹Dani Muhtado dan Ayon Diniyanto, *Dasar-dasar Ilmu Negara* (Semarang: BPFH Unnes, 2018) ,h. 56-57.

³⁰Syafii Maarif, *Alquran dan Realitas Umat...*, h. 11.

ditinggalkan atau mungkin ada revisi.³¹ Dengan demikian, bentuk negara ini akan mengalami perkembangan.

Menurut Syafii Maarif, bukan permasalahan bentuk negaranya, akan tetapi bagi Islam kekuasaan politik, baik itu monarki atau republik, namun kekuasaan politik itu haruslah dijadikan sebagai perangkat untuk mencapai tujuan Islam di muka bumi ini. Keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter di atas landasan tauhid adalah merupakan tujuan politik Islam.³²

c. Tujuan Negara

Tujuan negara dalam pandangan Syafii Maarif adalah untuk mewujudkan masyarakat *madani*.³³ Masyarakat *madani* itu adalah karakter dari masyarakat kota. Masyarakat *madani* sangat erat kaitannya dengan peradaban (*civilization*) yang dalam kamus Bahasa Arab, istilah ini lebih dikenal dengan *tamaddun* yang berarti peradaban dan kebudayaan tinggi. Masyarakat *madani* dalam bentuk konkret menurut Syafii Maarif adalah rekaman sejarah perjalanan hidup Nabi Muhamamad Saw di Madinah ketika beliau mendirikan sebuah negara yang bernama Madinah. Tatanan masyarakat yang dibentuk Nabi biasanya disebut dengan Masyarakat Madinah, atau masyarakat kota dalam arti sebagai tatanan sosial yang teratur dan sopan, beradab dan berperadaban. Masyarakat Madani bersumber dari iman kepada Allah dalam konteks pola hubungan antara sesama manusia, bermuara pada usaha pembentukan masyarakat teratur, berperadaban, dengan tiang penyangga yang terdiri atas pribadi-pribadi yang disemangati oleh rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah.³⁴

Apakah sama antara *masyarakat Madani* dengan Masyarakat Sipil (*civil society*) yang lahir dari rahim peradaban Barat yang sekuler? Dalam pandangan Syafii Maarif bahwa antara keduanya ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah masyarakat sipil dan masyarakat Madani sama-sama memiliki corak *egalitarian, toleran, dan terbuka*. Nilai-nilai ini ada pada *masyarakat madani* dan *masyarakat sipil*. Perbedaannya, pada masyarakat sipil yang dilahirkan di Barat tidak akan lepas dari filsafat mereka yang liberal, di mana peranan individu-individu sangat dominan, sehingga berpengaruh kepada keadilan. Permasalahan keadilan ini akan semakin tampak jelas dalam permasalahan keadilan ekonomi dan keadilan sosial, sedangkan dalam masyarakat Madani, keadilan ekonomi dan sosial merupakan pilar utama dalam sebuah

³¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), h. 60.

³²*Ibid.*

³³Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad...* h. 50.

³⁴*Ibid.*, h. 46-47.

negara.³⁵ Perbedaan antara masyarakat madani dan sipil yang dicitacitakan adalah kalau pada masyarakat madani akan terwujud keadilan ekonomi dan sosial, sedangkan pada masyarakat sipil diakibatkan adanya kebebasan individu yang terlalu bebas maka ia akan menimbulkan ketidakadilan pada sektor ekonomi dan sosial.

d. Kepala Negara

Menurut Syafii Maarif pemimpin sebuah negara harus orang yang terbaik dan mampu untuk memimpin warganegaranya dalam rangka mencapai tujuan negara yang mereka bentuk tersebut. Pemimpin harus dipilih dari orang yang terbaik pada masanya, sehingga untuk mendapatkannya perlu dilakukan pemilihan kepala negara, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum dalam pandangan Syafii Maarif akan memberikan kewenangan bagi rakyat untuk memetakan masa depan bangsanya.³⁶ Aturan tentang cara untuk mendapatkan calon pemimpin ini tidak diatur dalam Islam. Itu diserahkan kepada ijtihad warga negaranya, apakah melalui khilafah, yaitu turun temurun dari pemimpin sebelumnya atau dengan cara memilih perwakilan rakyat (*ahlul halli wala'qdi*) sehingga mereka yang akan memilih calon pemimpin negara mereka, atau dengan cara langsung warga negara memilih pemimpin mereka. Semua cara ini diserahkan kepada kesepakatan rakyatnya atau warga negaranya.

Menurut Syafii Maarif bahwa dalam sejarah peradaban Islam, cara pertama dan kedua sudah pernah ditempuh, yaitu sistem khilafah dan sistem perwakilan warga negara yang disebut dengan *ahlul halli wal'aqdi*. Sebelum Rasulullah Saw wafat ia tidak menentukan siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai kepala negara. Urusan kepala negara diserahkan kepada umat sehingga ia tidak perlu berwasiat untuk menentukan siapa kelak yang akan menjadi kepala negara menggantikannya.

Setelah dibaca beberapa karya Syafii Maarif, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa persyaratan seorang pemimpin negara yang disampaikan oleh Ahmad Syafii Maarif, di antaranya adalah: *Pertama*, amanah dan Adil. Pemimpin adalah orang yang terbaik untuk menerima amanah dari rakyatnya, olah karena itu ia harus amanah dalam melaksanakan amanat dari rakyat tersebut. Karena masyarakat yang dipimpin oleh kepala negara bervariasi, banyak kepentingan dan membutuhkan bantuannya, maka ia harus mampu berbuat adil. Menurut Syafii Maarif, amanah dan adil ini bisa dilihat dari latarbelakangnya. Syafii Maarif, tidak mensyaratkan kepala negara harus beragama muslim. Syafii Maarif mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang adil

³⁵*Ibid.*, h. 47.

³⁶Syafii Maarif, *Menerobos Kemelut; Catatan-catatan Kritis Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.113.

akan mampu menegakkan negara walaupun ia kafir, namun seorang pemimpin yang zalim malah akan menghancurkan negara walaupun ia Muslim. Hal senada Syafii Maarif juga mengutip dari kitab *al-Hasabah* yang menyatakan negara akan tetap tegak berdiri dengan keadilan dan kekufuran, akan tetapi negara akan segera hancur dengan kezaliman dan Islam.³⁷ Persyaratan ini adalah berdasarkan kepada Q.S. an-Nisa/4:5.

Kedua, kepala negara itu harus orang yang kuat dalam artian mampu untuk memimpin. Ini dikutipnya dari pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan syarat kepala negara adalah kuat dan integritas didasarkan kepada Q.S. al-Qashas/26. Ayat ini bercerita ketika anak Nabi Syuaib memilih Nabi Musa untuk bekerja bagi mereka dan menjadi suaminya anaknya, persyaratannya adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Persyaratan Kepala Negara yang *ketiga* adalah memiliki wawasan makro dan global. Kepala negara harus memiliki wawasan yang luas dan tidak sempit sebatas lingkungannya saja. Ia harus mampu mengembangkan wawasan makro dan global dalam masalah-masalah Islam dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, dimana pun kita berada dan apapun posisi yang kita pegang, kita jangan sekali-kali kehilangan wawasan dan orientasi semacam itu.

Persyaratan *keempat* memiliki akhlak kepemimpinan. Menurut pandangan Syafii Maarif, pemimpin adalah barometer bagi negara dan rakyatnya. Oleh karena itu pemimpin itu harus menjadi contoh tauladan dalam pola perilaku yang bisa menjadi model atau *uswatun hasanah* dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam percakapan dan juga tindakan dan gaya hidup. Syafii Maarif sering mengistilahkan pemimpin negara ini dengan istilah kepala ikan. Apabila kepala ikan sudah mulai membusuk maka seluruh badannya pun sudah rusak dan busuk. Ini artinya apabila kepala negara sudah tidak menjadi contoh, model dan suri tauladan maka rakyatnya pun sudah menjadi rusak.

Persyaratan *kelima* memiliki kemampuan dialog. Salah satu syarat pemimpin atau kepala negara itu harus mampu berkomunikasi, karena ia akan menghadapi beberapa persoalan yang besar dan rumit. Pemimpin itu harus mampu untuk membudayakan secara mantap dan bertanggungjawab pendekatan dialogis dalam membenahi apa yang dipimpinnya. Apabila yang dipimpin adalah negara, maka ia harus mampu mengajak dialog setiap elemen yang ada dalam negara tersebut.³⁸ Persyaratan ini sebenarnya merupakan turunan dari syarat-syarat di atas. ketika seorang pemimpin sudah amanah, adil dan berwawasan luas, maka ia akan mampu berkomunikasi dan berdialog dengan baik.

³⁷Maarif, *Tuhan Menyapa Kita...*, h.59.

³⁸*Ibid.*

Syafii Maarif menolak persyaratan kepala negara harus bersuku Quraish, dan harus laki-laki. Kepala negara boleh dari suku mana saja, dan boleh juga berjenis kelamin perempuan. Siapa saja bisa menjadi pemimpin negara, baik itu dia laki-laki atau pun perempuan, baik itu dia dari suku kelompok atau suku mana saja, asal ia dipilih oleh rakyat untuk menerima amanah tersebut. Orang Cina, Indonesia dan bahkan Arab bisa menjadi pemimpin negara dalam pandangan Islam, asal ia amanah dan adil. Menurut analisis Syafii Maarif mengapa ada persyaratan suku Quraish untuk menjadi kepala negara sebagaimana yang ditulis oleh al-Mawardi adalah dalam upaya mempertahankan daulah Abbasiyah yang masih berdarah Quraish yang pada abad 11 sudah sangat rapuh.³⁹ Ini artinya bahwa Syafii Maarif mengetahui ada sekelompok mujtahid yang berpandangan bahwa kepala negara adalah harus dari suku Quraish, namun pendapat itu tidak lepas dari konteksnya.

Pemikiran yang diungkapkan oleh Syafii Maarif ini sepertinya adalah pemikiran yang sangat radikal, artinya sangat mendasar, karena sebelumnya dijelaskan bahwa menurut fiqh siyasah pemimpin negara itu harus muslim dan suku Quraish. Ini tidak dapat dipungkiri karena ada beberapa penjelasan di dalam kitab-kitab fiqh yang menyatakan bahwa syarat pemimpin negara adalah suku Qurash, seperti Al-Baqillani, Al-Baghdadi, dan Al-Mawardi, Al-Ghazali. Namun walaupun demikian, ada juga pemikir muslim klasik yang tidak mensyaratkan pemimpin negara harus dari suku Quraish. Siapa saja boleh jadi kepala negara asal memiliki keahlian dan kemampuan, yaitu Ibnu al-Rabi, al-Haramain dan Ibnu Taimiyyah. Bagi mereka, syarat utama kepala negara itu adalah mampu melaksanakan tugasnya dan menegakkan keadilan serta kebenaran. Ia harus orang yang cerdas sehingga ia mampu mengurus kemaslahatan sesuatu dan mampu memeliharanya dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pemimpin itu harus kuat dan amanah, tidak mesti dari suku tertentu, seperti Quraish.⁴⁰

e. Peran Wanita dalam Negara

Sebagaimana dijelaskan bahwa warga negara itu sangat bervariasi, namun memiliki tujuan bersama. Oleh karena warga negara juga terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Perempuan juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam sebuah negara yang mereka bentuk. Ia memiliki hak untuk menjadi kepala negara selama ia memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Pemikiran tentang adanya hak kaum wanita untuk mengurus negara atau sebagai pemimpin dalam sebuah negara merupakan *ikhtilaf*. Sudah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sebelum Syafii Maarif. Di antara para ulama yang

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 253-259.

berpendapat bahwa boleh kaum wanita untuk menjadi pemimpin, bahkan untuk memimpin sebuah negara adalah seperti M.Quraish Shihab,⁴¹ dan Said Aqil Siradj dari Indonesia, sedangkan pemikir muslim lain seperti Amina Wadud dan Fatimah Mernissi. Syafii Maarif tidak mendewakan jenis kelamin dan bahkan juga tidak mendewakan keturunan. Menurutnya keturunan raja, ulama atau bahkan keturunan nabi termasuk dalam kategori perbudakan spritual. Ia menyatakan:

Bagiku gelar-gelar sayid, syarifah, wali, habib, dan 1.001 gelar lain yang mengaku keturunan nabi, atau keturunan raja, hulubalang atau keturuanan bajak laut dan perompak lanun yang kemudian ditakdirkan menjadi raja, sultan, amir dan dianggap keramat dan suci oleh sebageian orang, akan runtuh berkeping-keping berhadapan dengan penegasan ayat Alquran Surat al-Hujurat/49:13.⁴²

Untuk memperkuat argumentasinya, Syafii Maarif mengutip Q.S. al-Hujurat/49:13. Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan “seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menilai begitu tingginya kerja spritual seseorang. Ayat ini memberikan *personal achievement* sesuatu yang sangat penting dan menentukan, bukan lagi hubungan darah, karena hubungan darah itu tidak punya makna apa-apa.⁴³ Keturunan dan gelar dan bahkan jenis kelamin tidak akan dipandang di mata Allah Swt. Argumentasi yang disampaikan oleh Syafii Maarif untuk mendukung pendapatnya, ia menyebutkan bahwa untuk merebut posisi takwa terbuka bagi seluruh orang beriman, tanpa terkait dengan latar belakang keturuanan, kultur, sejarah, ekonomi, dan apa pun. Yang sangat perlu disadari adalah posisi seseorang di dunia ini menurut yang dipahami oleh Syafii Maarif adalah ditentukan oleh kualitas hidupnya, kualitas iman dan amalnya, tidak oleh orang lain. Dengan paradigma semacam ini terbukalah peluang yang sama bagi semua anak Adam untuk ber-*fastabqul khairat*, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Syafii Maarif menjelaskan bahwa Islam baginya akhirnya sudah merupakan pilihan secara sadar bukan hanya keturunan.⁴⁴

⁴¹ Lihat M.Quraish Syihab, *Membumikan Alquaran* (Bandung: Mizan, 1998), h. 273.

⁴²Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalalanku...*, h. 73.

⁴³*Ibid.*

Menurut Syafii Maarif bahwa perempuan yang akan menjadi kepala negara harus pribadi yang benar-benar punya kemampuan prima, bermoral, dan akan lebih baik pasca usia 40 tahun, karena pada saat itu ia telah lebih longgar untuk berkiprah di bidang politik. Rintangan-rintangan alamiah sebagai risiko menjadi perempuan sudah sangat berkurang. Dengan demikian perhatian untuk membela rakyat menjadi terbuka lebar. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah izin suami, sekiranya ia masih bersuami.⁴⁵

f. Toleransi Umat Beragama dalam Negara

Dalam pemikiran Syafii Maarif bahwa toleransi inter dan antar umat bergama itu sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara secara bersama. Toleransi umat bergama itu juga dibarengi dengan toleransi dengan mereka masyarakat yang tidak menganut agama apapun (*ateis*). Hal ini karena ketika seseorang diperbolehkan untuk menyatakan pendapatnya dan pemikirannya bahwa Islam merupakan pilihannya yang terbaik dan terakhir, maka hak yang sama tentu juga harus diberikan kepada orang lain untuk menentukan agama sesuai dengan keyakinannya.⁴⁶

Sayafii Maarif mendasari pemikirannya tentang toleransi umat beragama adalah berdasarkan kepada Q.S. al-Baqarah/2:256 yang artinya: *tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*; dan Q.S. Yunus/10: 99, yang artinya: *Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*. Menurut Syafii Maarif, bumi ini diberikan oleh Allah Swt bukan hanya untuk umat Muslim, akan tetapi untuk semua umatnya, baik itu mereka yang beriman ataupun mereka yang tidak beriman. Semuanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati bumi ini dengan asas keadilan dan toleransi. Tidak ada yang mempunyai hak monopoli di muka bumi ini, dan bahkan umat Islam seharusnya secara aktif mengembangkan budaya toleransi dan juga umat yang lain. Oleh karena itu jika ada di muka bumi ini agama atau politik yang ingin mengusir pihak lain maka mereka sebenarnya adalah musuh peradaban dan kemanusiaan yang harus dilawan, apapun agama dan kepercayaan.⁴⁷

Apabila dianalisa pemikiran Syafii Maarif ini, ini adalah sangat cocok dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu adanya kebebasan dalam beragama dan tidak saling mengganggu dalam mengisi

⁴⁴*Ibid.*, h.74.

⁴⁵*Ibid.*, h.201.

⁴⁶Ahmad Syafii Maarif, Informan Utama, wawancara melalui Whatsapp pada tanggal 5 Desember 2021.

⁴⁷Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalalanku...*, h.199.

kemerdekaan. Kerberagaman adalah modal untuk pembangunan dan mengisi kemerdekaan, dan bahkan Syafii Maarif menolak pemberlakuan syariat Islam secara formal di Indonesia dalam rangka menghargai kelompok yang lain berbeda dengan Islam.⁴⁸

Kita sebagai bangsa yang majemuk dengan multi suku, agama, ras dan golongan seringkali mendapat cobaan dalam hal toleransi. Hadirnya paham transnasional dan juga pengaruh gurunisme telah banyak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Paham radikalisme agama dan tindakan intoleran berkembang sedemikian rupa. Bangsa ini seakan diserbu paham radikalisme dan tindakan intoleran. Disini Buya selalu menyuarakan penting dan urgensinya toleransi dan urgensi NKRI itu.⁴⁹

Aksi Politik Syafii Maarif

Dalam ilmu politik dijelaskan bahwa aksi politik adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan politik. Ia terwujud dalam dua bentuk, yaitu aksi politik dengan ikut serta di dalam pemerintahan dan aksi politik di luar pemerintahan. Aksi politik yang dilakukan oleh Syafii Maarif melalui pemerintahan adalah dengan cara memasuki lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yaitu semenjak tanggal 11 Juni 1998 hingga akhir tahun 2003. Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) lebih dari lima tahun, yaitu pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Ketika berada di DPA, ia merasakan berada di dalam sekolah politik secara langsung.⁵⁰ Dia sering membuat pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan dan argumentasi dan pernyataan yang padat dan dibungkus dengan bahasa yang sopan untuk dapat meyakinkan presiden, karena tugas dan fungsi dari DPA adalah memberikan masukan dan pertimbangan bagi presiden supaya presiden tidak salah dan keliru dalam menentukan putusan dan kebijakan. Menurutnya hanya Presiden B.J. Habibie lah yang sering menerima masukan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Tugas ini dilaksanakan oleh Syafii Maarif bersamaan dengan mengurus Muhammadiyah.

Sedangkan aksi politik di luar pemerinatahan adalah dengan dua cara, yaitu dengan melakukan penekanan dan melakukan lobi. Aksi politik dalam bentuk penekanan yang dimaksud adalah berbeda dengan aksi politik di dalam

⁴⁸Dikutip pada tanggal 22 Februari 2022 dari web <https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/05/27/230693/syafii-maarif-kontroversi-dan-perjalanan-hidupnya.html>

⁴⁹Dikutip pada tanggal 2 Juni 2022 dari web <https://www.kompasiana.com/aldentua/62916beabb448609bf100684/buya-syafii-maarif-sikap-toleransi-di-tengah-maraknya-intoleransi>.

⁵⁰Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanku...*, h.259.

partai politik atau ikut serta di dalam sebuah partai politik. Perbedaan utamanya antara penekanan politik dan partai politik adalah di mana dalam kelompok penekan politik tidak bisa memiliki taktik penominasian calon sebagai wakil mereka di pemerintahan, karena yang bisa masuk ke dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanyalah mereka yang terpilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diusungkan oleh partai politik. Kelompok penekan politik hanya mampu mengoreksi dan mengkritisi dari luar pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Syafii Maarif melakukan penekanan kepada pemerintah melalui lembaga yang dipimpinya dan juga melalui pribadinya selama ia menjadi dosen dan tidak aktif lagi dalam organisasi keagamaan. Melalui lembaga yang dipimpinya adalah, yaitu melalui organisasi Muhammadiyah dan lembaga Maarif Institut yang dibangun dan dibinanya bersama teman-temannya. Sedangkan secara pribadi sebagai warga negara, ia juga sering memberikan penekanan kepada pemerintah untuk melaksanakan dan tidak melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan regulasi lainnya.

Dalam rangka melakukan penekanan kepada pemerintah, Syafii Maarif melakukan penekanan melalui Muhammadiyah, seperti penekanan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena isu yang sangat perlu diperhatikan pada masa itu adalah masalah tersebut. Syafii Maarif bersama tokoh-tokoh lain selalu menggaungkan bahwa korupsi adalah musuh peradaban dan musuh semua agama.

Syafii Maarif juga menekankan kepada pemerintah untuk menghilangkan laron politik, yaitu laron dalam bentuk manusia yang suka berkerumun di sekeliling seorang tokoh yang sedang bercahaya.⁵¹ Kelompok ini biasanya suka menjilat dan tidak membangun. Seharusnya mereka berperan untuk mengkritisi, memberikan koreksi dan nasehat, ternyata mereka bergabung dalam hal yang salah. Inilah yang masih sangat mengganggu dalam politik kita menurut Syafii Maarif.

Syafii Maarif juga menekankan bagaimana agar partai politik sebagai peserta pemilu seharusnya muncul dari keinginan masyarakat. Penyaringan partai politik yang dikomandokan dari atas hanyalah akan membuahkan sosok demokrasi semu atau *demokrasi daulat tuanku*, seperti yang terjadi pada 1973. Sedangkan *demokrasi daulat rakyat* baru akan menjadi kenyataan setelah sepenuhnya menerapkan sistim distrik dalam setiap pemilu.⁵² Seharusnya partai politik betul-betul tumbuh dari keinginan masyarakat, bukan atas kepentingan penguasa. Partai terbentuk hendaknya atas dasar keinginan dan kepentingan

⁵¹Maarif, *Menerobos Kemelut...*, h. 122-123.

⁵²*Ibid.*, h. 83.

masyarakat sebagai warga negara. Karena menurut ilmu politik, partai politik adalah salah satu mekanisme utama yang menghubungkan pemilih dengan institusi pemerintah.⁵³

Pada Pemilu 2004 dimana ketika itu Muhammadiyah dipimpin oleh Syafii Maarif, ia menekankan perlunya keberpihakan pada nilai-nilai moral dan sosial serta menghindarkan diri dari upaya memobilisasi massa untuk mendukung partai tertentu atau figur tertentu atau mengejar jabatan dan posisi tertentu di pemerintahan. Bahasa slogan yang lebih sering dipakai adalah *menjaga jarak yang sama* ke semua partai dan aktor politik.⁵⁴ Aksi ini dilakukan langsung oleh Syafii Maarif dalam rangka untuk mewujudkan keseimbangan posisi Muhammadiyah dalam negara. Hal ini terjadi karena pada masa itu sahabat karib dari Syafii Maarif ikut dalam kontestasi politik pemilihan presiden, yaitu Amien Rais. Aksi politik yang dilakukan oleh Syafii Maarif di luar pemerintahan. Ia tidak membawa Muhammadiyah pada salah satu partai politik atau juga pemerintahan, namun ia berada pada posisi penyeimbang, yaitu *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

Syafii Maarif juga menyiapkan generasi muda untuk mengawal negara ini. Ia membina generasi muda untuk mampu mengembangkan pemikirannya demi kemajuan agama dan Muhammadiyah, seperti membentuk Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang berisi anak muda potensial, cerdas dan bermasa depan yang cerah. Ia juga memberikan porsi bagi perempuan untuk berkiprah di dalam Muhammadiyah.

Sedangkan aksi politik dalam bentuk lobi, ia turut serta dalam untuk Perdamaian Aceh. Ia melakukan lobi bagaimana agar terwujud perdamaian di Aceh bersama dengan Ali Alatas, Surjadi Sudirdja, Ali Yafie, Nurcholish Madjid dan juga masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta.⁵⁵ Ia juga aktif dalam Perdamaian Umat Beragama. Ia mewujudkan komunikasi yang bagus dengan umat beragama lain dengan ikut serta dalam *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) dan menjabat sebagai salah satu presiden International of World Conference on Religion and Peace yang berpusat di New York.⁵⁶ Dalam negeri, Syafii Maarif menjalin kerjasama dengan Nahdlatul Ulama untuk bergandengan tangan membantu pemerintah. Banyak pihak menyatakan bahwa semasa kepemimpinan Syafii Maarif, hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat harmonis. Syafii Maarif melaksanakan seminar dan menulis buku, jurnal

⁵³Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik...*, h. 128.

⁵⁴Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan...*, h. 120.

⁵⁵Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanku...*, h.246.

⁵⁶Muhammad Ali, *Gagasan Islam Nasionalis-Humanis Ahmad Syafii Maarif* dalam Ahmad Najib Burhani, et.all (Ed), *Muazzin Bangsa dari Makkah Darat* (Jakarta: Maarif Institute dan Serambi, 2015), h. 279.

dan buletin. Syafii Maarif pernah menghadiri seminar sebagai pembicara di Brussels dengan tema *Islam, Society and Modernity*. Syafii Maarif juga memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk khutbah, ceramah dan juga pengajian. Ia sering menulis pada beberapa majalah dan koran, seperti pada Majalah Panji Masyarakat dan Harian Republika. Dalam hubungan internasional, Syafii Maarif pernah melaksanakan dialog diplomasi dan komunikasi dengan George W Bush, presiden Amerika Serikat dan juga Perdana Menteri Singapura Mr. Lee dan melaksanakan diplomasi kilat ke Bangkok dalam misi mencari fakta tentang tragedi brutal yang menimpa 85 orang muslim yang mati secara mengenaskan dalam kawalan aparat di Distrik Tak Bai, Provinsi Narathiwat Thailand Selatan.

Penutup

Hubungan Islam dan politik dalam pemikiran Syafii Maarif adalah merupakan ijtihad yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Politik merupakan ibadah yang tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, karena di dalam politik terdapat seni untuk mengurus kepentingan orang banyak. Politik dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, akan tetapi bagaimana agar kepentingan orang banyak bisa dipenuhi. Banyak ayat yang menjelaskan tentang politik dari pada ayat yang mengatur puasa. Oleh karena itu, berpidato di gedung parlemen juga merupakan ibadah yang memiliki pahala.

Pemikiran politik dari Syafii Maarif berkaitan dengan negara adalah negara bukanlah *din*, akan tetapi ia merupakan ijtihad politik. Karena negara adalah ijtihad politik maka dasar negara diserahkan kepada warga negara yang membentuk negara tersebut, bisa berdasarkan agama Islam dan juga bisa berdasarkan kesepakatan yang membentuk negara tersebut. Menurut Syafii Maarif, bentuk negara yang ideal saat ini adalah republik demokrasi karena ia dibangun atas dasar musyawarah dan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kepala negara adalah orang yang dipilih oleh warga negara dengan syarat ia adalah amanah, adil, berkualita dan berwawasan luas oleh karena tidak mesti suku Quraish, tidak mesti harus laki-laki dan juga tidak mesti harus menganut agama Islam. Suku apa saja, jenis kelamin apa saja dan penganut agama apa saja ia boleh menjadi kepala negara selama ia amanah, adil, berkualitas dan dipilih oleh warga negara. Syarat utama kepala negara menurut Syafii Maarif adalah amanah dan adil sesuai dengan ketentuan ayat Alquran.

Aksi politik yang ditempuh oleh Syafii Maarif adalah melalui jalur masuk ke dalam pemerintahan dan juga dari luar pemerintahan. Syafii Maarif pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang bertugas memberikan masukan dan nasehat bagi presiden sebagai kepala negara. Ia juga melakukan aksi politik melalui penekanan kepada pemerintah untuk

melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Dasar melalui organisasi Muhammadiyah dan Maarif Institut yang dibentuknya bersama teman-teman. Aksi politik yang dilakukannya juga melalui lobi-lobi, diantaranya lobi untuk perdamaian di Aceh, perdamaian antar umat beragama dan lobi dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Ia juga melakukan diplomasi dan komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, George W Bush dan Perdana Menteri Singapura serta dengan Pemerinatahan Thailand. Ia tidak melakukan aksi politik melalui partai, karena menurutnya ia sudah tua sehingga tidak sanggup lagi dan juga karena di dalam partai politik itu terdapat banyak kepentingan.

Referensi

- Burhani, Ahmad Najib, et.all (Ed), *Muazzin Bangsa dari Makkah Darat*, Jakarta: Maarif Institute dan Serambi, 2015.
- Frederick, William H., *Batu Loncatan; Syafii Maarif di Athens, Ohio AS* dalam Epilog buku Ahmad Najib Burhani, et.al (Ed.), *Muazin Bangsa dar Makkah Darat*, Jakarta: Serambi, 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2002.
- _____, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1950-1965*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- _____, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Jakarta: Mizan, 2009.
- _____, *Mencari Autensitas dalam Kegalauan*, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2004.
- _____, *Masa Deapan Bangsa dalam Taruhan*, Yogyakarta, Pustaka SM, 2000.
- _____, *Menggugah Nurani Bangsa*, Jakarta, Maarif Institute, 2005.
- _____, *Tuhan Menyapa Kita*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2020.
- _____, *Titik-titik Kisar di Perjalalanku; Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*, Jakarta: Mizan dan Maarif Institut, 2009.
- _____, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3EStut, 2009.
- _____, *Alquran dan Realitas Umat*, Jakarta: Republika, 2010.
- _____, *Alqur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah; Sebuah Refleksi*, Bandung; Penerbit Pustaka, 1985.
- _____, *Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- _____, *Meluruskan Makna Jihad Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, Jakarta: Centre for Moderate Moslem, 2005.

- _____, *Tuhan Menyapa Kita*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2020.
- _____, *Menerobos Kemelut; Catatan-catatan Kritis Sang Guru Bangsa*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Maududi, Abul A'ala, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan , 1998.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam* ter. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994.
- _____, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999.